

## **MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PAI**

Oleh:

Ali Murtadho, M.S.I

*Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung*

*e-mail: alimurtadho79@yahoo.co.id*

### **Abstract**

Nowadays multiculturalism becomes an important issue, particularly after a series of conflicts that often occur in this country in recent years. Moving on from the problem, then, initiated a deeper understanding of inclusive, pluralistic, and tolerant becomes a necessity; hopes such cases social conflict leading to anarchy in the name of SARA (Tribe, Religion, Race, Class), and other interests who slipped behind it, is not repeated in the future. These issues are of course not only deals with the problem of how we manage conflict, diversity, and political recognition of the otherness of course. However, more than that, that multiculturalism can be understood as "trust" to normality and acceptance of diversity. For that, one of the most effective ways to cultivate an understanding of a more inclusive, pluralist, and tolerant it is through the learning process. The following article seeks to initiate a deeper understanding of inclusive, pluralistic, and tolerant, through developing multicultural education in learning PAI

**Keywords: Multicultural Education, Learning, PAI**

## **A. Pendahuluan**

Sebagai gambaran, untuk mengawali tulisan ini, menurut temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR)*, lembaga di bawah payung *United Nations Development Programme (UNDP)* yang telah mengadakan penelitian selama 10.000 jam bersama dengan CSPS-UGM dan LP3ES, yang diluncurkan dalam bentuk database di Kantor Bappenas, Jakarta, angka kematian akibat konflik sosial yang terjadi di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus.

Penelitian yang dilakukan di 14 provinsi ini antara lain Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Keempat belas provinsi ini dipilih dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan media massa nasional, Kompas dan Antara, pada keempat belas provinsi itu mencakup 96,4 persen seluruh korban tewas di Indonesia. Dari data tersebut, kematian terbanyak terjadi tahun 1999 yang jumlah keseluruhan mencapai 3.546 nyawa melayang. Namun, insiden kekerasan kolektif antarwarga masyarakat justru lebih banyak terjadi di tahun 2000 yang mencapai 722 kasus meski menelan korban tidak sebanyak tahun sebelumnya. (rinesosiolog.blogspot.com, 2015)

Dengan melihat data di atas, sungguh membuat kita mengelus dada. Untuk itu, mengembangkan pendidikan multikultural dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan keniscayaan.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik seperti digambarkan di atas, mengutip pendapatnya Amin Abdullah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) dalam beragam aktifitas kehidupan sosial. (Amin Abdullah, 2005)

Sebab, multikulturalisme sebagai suatu paham yang bergerak untuk memahami dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, bila tidak dikemas dalam ranah pendidikan dan penyadaran, akan memiliki potensi cukup besar bagi terjadinya konflik antar kelompok. Prinsip keberagaman di masing-masing kelompok, misalnya, akan mudah menimbulkan “percikan-percikan” konflik antar kelompok yang ada lantaran adanya

beberapa perbedaan yang cukup mendasar dari masing-masing kelompok itu. Bahkan, dalam skala lebih luas, manifestasi dari prinsip multikulturalisme itu bisa merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis, budaya, bahasa, agama, keyakinan, pola pikir, maupun perbedaan kemampuan (*diffable*) secara fisik maupun psikhis. Perbedaan-perbedaan itulah yang sekiranya tidak segera diantisipasi akan menjadi pemicu konflik. Dan, tidak jarang konflik itu akan berujung pada kekerasan fisik, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah.

Pada titik inilah urgensi wacana multikultural sudah semestinya tidak hanya berhenti pada wacana di ruang-ruang seminar saja. Namun lebih dari itu, ia mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan melalui proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas lewat implementasi pendidikan multikultural di lembaga pendidikan.

Toto Suharto dengan mengutip pendapat tokoh pedagogy kritis (*critical pedagogy*) Henry Giroux menjelaskan bahwa isu-isu penting yang dihadapi abad mendatang, semisal multikulturalisme, ras, identitas, kekuasaan, pengetahuan, etika dan kerja, harus diajarkan di sekolah-sekolah dengan pendekatan studi cultural (budaya). Tujuannya adalah untuk memperluas kemungkinan bagi terwujudnya demokrasi radikal. (Toto Suharto, 2012) Artinya, dunia pendidikan dapat dijadikan sebagai pintu masuk paling potensial dalam penyemaian dan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural. Sebab, penyemaian dan penanaman tersebut wajib dilakukan semenjak usia dini, agar nantinya tercipta atmosfer nirkekerasan dan bina damai dalam kehidupan masyarakat.

Didasarkan pada argument di atas, untuk optimalisasi fungsi edukatif dari implementasi pendidikan multikultural tersebut, maka lembaga pendidikan (Islam) semestinya harus mampu menyuguhkan pendidikan yang inklusif (terbuka), baik dari sisi tujuan, kurikulum pendidikan, guru yang mengajar, strategi yang digunakan, maupun perilaku sosial-keagamaan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. (Moh. Roqib, 2011)

Proses transfer nilai tersebut tentunya dilakukan bukan hanya dengan *mauidhah* atau ceramah monologis semata dari seorang pendidik, tetapi juga harus dilakukan dengan *uswah* atau teladan baik. Karenanya, agar penanaman nilai multikulturalisme ini berjalan efektif, obyek yang dituju dalam dunia pendidikan bukan hanya siswa atau peserta didik saja, melainkan juga para guru, ustadz, dosen, kepala sekolah, direktur, dekan, rektor, dan semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan secara makro maupun mikro. (Amin Abdullah, 2005)

Seperti diketahui bahwa, pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Tetapi sebaliknya, ia harus diupayakan secara sistematis, programis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan seluruh lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas. (Azumardy Azra, 2005)

Disinilah kemudian pentingnya fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mendidik serta menyiapkan calon pendidik (guru) untuk membekali dan menanamkan pendidikan multikultural kepada calon-calon guru dalam proses pembelajarannya. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa, guru merupakan ujung tombak sekaligus sebagai agen perubahan dalam proses pembelajaran, dimana ia nantinya dapat membekali para siswa tentang pengetahuan untuk bekal hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka, sudah menjadi keniscayaan LPTK dapat mengembangkan pendidikan multikultural ini dalam proses kegiatan belajar-mengajar.

### **1. Apa itu Pendidikan Multikultural?**

Istilah multikulturalisme, mengutip tulisan dari Martine A. Petceille dalam buku kompilasi hasil riset Université de Nantes, Perancis, adalah:

*“Le concept de multiculturalisme est appréhendé de manière différente en France et en Amérique du Nord. Souvent confondu avec l’interculturalisme en France, il a, en réalité, une origine et correspond à des choix politiques, philosophiques, sociaux et historiques différents. Le multiculturalisme est concomitant à la lutte pour les Droits civiques des années 60 suite à une politique migratoire caractérisée par l’idéologie du melting-pot..... (c’est-à-dire l’intégration des immigrants de toutes provenances et de toutes conditions sociales dans une même culture) (Driss alaoui, 2010)”*

Dari pendapat di atas konsep multikulturalisme dipahami secara berbeda di Perancis dan Amerika Utara. Di Perancis konsep ini dikenal dengan istilah interkulturalisme. Konsep ini didasarkan pada pilihan politik, filsafat, sosial, dan sejarah yang beragam. Keragaman ini digaungkan sebagai bentuk perjuangan hak-hak sipil di tahun 1960-an untuk “melawan” ideology *melting pot* yang berkembang di Amerika, yaitu paham integrasi imigran dari semua sumber dan semua kondisi social budaya yang sama.

Gagasan pendidikan multikultural sebenarnya sudah lama telah berkembang di Eropa, Amerika, dan di negara-negara maju lainnya. Cristina Allemann-Ghionda, pendidik dari *University of Cologne*, Jerman, memaparkan bahwa:

*“The dimension of cultural and linguistic diversity and its significance for education have been discussed in Europe especially after the Second World War, but much more intensely from the mid-1970s on, when migration became visible as a stable fact in many immigration countries. The role of international organizations such as UNESCO, the Council of Europe, OECD, and the European Commission was and is influential in this field, promoting both discussion and international cooperation on policies, theory building, and research on implementation (CDCC, 1986; Commission of the European Community, 1994; OECD, 1991; Sténou, 1997; Wagner, 1997). Many universities in immigration countries boast scholarship on migration studies and, particularly, on the relationships between migration, multicultural society, the importance of culture for the development of individuals, bilingualism, multilingualism, and the aims and contents of education.” (Cristina, 2001)*

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural sesungguhnya memang telah lahir di Eropa sesudah Perang Dunia II (PD II). Dimensi keanekaragaman budaya dan bahasa serta pentingnya untuk dunia pendidikan telah jauh-jauh hari dibahas secara intens sekitar pertengahan tahun 1970-an, ketika gelombang migrasi menjadi fakta yang tak terbantahkan di negara-negara tersebut.

Bahkan, H.A.R. Tilaar yang menukil tulisannya Pradeep A. Dillon dan J. Mark Halstead “*Multicultural Education*” dalam buku *Philosophy of Education* dengan sangat tegas mengungkapkan bahwa pemikiran mengenai multikulturalisme dalam dunia pendidikan kemungkinan telah jauh-jauh hari berkembang menjelang setengah abad atau seabad lamanya. Selain itu, perkembangan wacana multikulturalisme khususnya di Amerika Serikat, seperti dijelaskan H.A.R. Tilaar, terjadi ketika kebudayaan di negara ini didominasi oleh kebudayaan “*WASP*” yaitu kebudayaan putih (*white*), dari bangsa *Anglo Saxon* (yang berbahasa Inggris) dan yang beragama Protestan telah mendominasi kebudayaan di negara ini. Sehingga, nilai-nilai *WASP* inilah yang kemudian menguasai *mainstream* kebudayaan di negara Paman Sam tersebut. (Tilaar 2009)

Pada akhirnya, terjadilah segregasi dan diskriminasi, bukan hanya dalam bidang ras, tetapi juga dalam bidang agama, budaya, dan gaya hidup. Konsekuensi selanjutnya adalah, terjadi politik diskriminasi terhadap kelompok *non-WASP*, seperti kelompok Indian (*native America*), kelompok *Chicano* (dari negara-negara Latin terutama Mexico), dan pada akhir abad XX dari kelompok Asia-Amerika.

Di dalam menghadapi masyarakat yang bersifat “*melting pot*” seperti dijelaskan di atas, selanjutnya, dikembangkanlah berbagai praktik pendidikan yang berusaha untuk menggaet kelompok-kelompok suku bangsa tersebut (*non-WASP*) di dalam suatu kebudayaan

*mainstream* yang didominasi oleh WASP.(Tilaar, 2012) Pendekatan pendidikan yang diskriminatif ini selanjutnya mulai berubah, disebabkan oleh pengaruh-pengaruh perkembangan politik dunia seperti HAM, deklarasi negara-negara anggota PBB (*Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948), juga gerakan hak asasi manusia (*human rights movement*) yang semakin mengglobal, serta proses dekolonisasi akhir PD II juga ikut merontokkan garis-garis segregasi antarras tersebut.

Pendapat di atas diperkuat argument James A. Banks. Ia menjelaskan:

*“Multicultural education grew out of the ferment of the Civil Rights Movement of the 1960s. During this decade, African Americans embarked on a quest for their rights that was unprecedented in the United States. A major goal of the Civil Rights Movement of the 1960s was to eliminate discrimination in public accommodations, housing, employment, and education. The consequences of the Civil Rights Movement had a significant influence on educational institutions as ethnic groups—first African Americans and then other groups—demanded that the schools and other educational institutions reform curricula to reflect their experiences, histories, cultures, and perspectives”*(James, 2010).

Selanjutnya, munculnya gerakan feminisme juga turut berpengaruh dalam proses perubahan tersebut. Pada akhirnya, semua pengaruh tersebut mulai gencar dikumandangkan dan menghasilkan suatu bentuk pendidikan yang ingin merobok-robek politik segregasi tersebut. Praktik-praktik pendidikan untuk menanamkan rasa persatuan bangsa juga gencar dilaksanakan, seperti upaya menghilangkan sekolah-sekolah segregasi, mengajarkan budaya-budaya dari ras-ras lain dan studi-studi etnis yang hidup dalam masyarakat Amerika untuk diajarkan di semua jenjang sekolah di negara ini. Kemudian praktik-praktik tersebut dikaji dan disempurnakan.(James, 2010).

Pendidikan multikultural ini sebenarnya merupakan pengembangan dari studi intercultural (istilah ini dikenal di Eropa) dan multikultural. Merujuk pendapat dari UNESCO definisi istilah ini adalah:

*« ....Le terme multiculturel renvoie à la nature culturellement variée de la société humaine. Il ne se réfère pas seulement à des éléments de culture ethnique ou nationale, mais s'applique aussi à la diversité linguistique, religieuse et socio-économique..... L'interculturalité est un concept dynamique qui se réfère aux relations évolutives entre groupes culturels. Elle a été définie comme « l'existence et l'interaction équitable de diverses cultures ainsi que la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel » L'interculturalité présuppose le multiculturalisme et résulte d'un échange et d'un dialogue « interculturels » sur le plan local, régional, national ou international ». (Unesco, 2006)*

Dari definisi yang dijelaskan UNESCO di atas, dapat kita pahami bahwa istilah multikultural bisa dimaknai sebagai sifat beragam budaya dari suatu masyarakat. Konsep ini

mengacu tidak hanya untuk unsur budaya etnis suatu bangsa, tetapi juga berlaku untuk bahasa, agama, serta sosial-ekonomi. Selanjutnya, istilah interkulturalisme dapat dimaknai sebagai konsep dinamis yang mengacu pada hubungan evolusioner antar kelompok-kelompok budaya.

Selanjutnya, istilah ini adalah sebagai suatu keadaan dan interaksi beragam budaya yang adil serta dapat menghasilkan ekspresi budaya bersama melalui jalur dialog yang dilandasi rasa menghormati lintas kebudayaan dengan landasan multikulturalisme sebagai hasil dari, meminjam istilah yang diungkapkan Henry Giroux, pertukaran lintas batas kebudayaan (*border crossing*)( Henry Giroux, 2005), dengan cara dialog baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Pada hakekatnya *inter-cultural education* ini adalah suatu upaya *cross cultural education*, yaitu mencari nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Pendidikan interkultural ini pada hakekatnya mempunyai dua tema pokok; *pertama*, melalui pendidikan interkultural ini, seseorang tidak malu terhadap latar belakang budayanya. *Kedua*, perlu dikembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ras, agama, dan budaya.

Oleh sebab itu, untuk pengembangan sikap toleransi ini, dianjurkan program asimiliasi budaya. Di dalam kaitan ini, yang terpenting adalah adanya persamaan dan bukan meletakkan perbedaan-perbedaan kebudayaan. Oleh sebab itu, di dalam program pendidikan ini dikembangkan dua hal, yaitu: *pertama*, masalah prasangka (*prejudice*) yaitu bagaimana mencari akar-akar dari prasangka (baik prasangka ras maupun agama). *Kedua*, mencari cara-cara yang efektif untuk mengubah tingkah laku untuk mengatasi prasangka-prasangka tersebut.(Tilaar, 2009) James A. Banks seperti dikutip Jacqueline Jordan Irvine juga menjelaskan:

*“Multicultural education is a field of study designed to increase educational equity for all students that incorporates, for this purpose, content, concepts, principles, theories, and paradigms from history, the social and behavioral sciences, and particularly from ethnic studies and women studies”* (Irvine, 2003)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa, pendidikan multikultural adalah sebuah ide atau konsep, juga sebagai sebuah gerakan reformasi pendidikan, dan sebagai proses pendidikan untuk mengakomodir semua kepentingan siswa baik dilihat dari karakteristik jenis kelamin, kelas sosial, etnis, ras, atau latar belakang budaya dari siswa itu sendiri.

Disisi lain pendidikan multikultural ini dapat membantu para guru dalam mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta melayani para siswa yang secara kesejarahan termarginalisasi

oleh institusi atau oleh orang-orang yang memiliki posisi istimewa. Michael Vavrus menjelaskan: “*Multicultural education can help teachers acquire knowledge, skills, and dispositions that serve all children and youth, especially students whose interests have been historically marginalized by institutions and people in privileged positions. (Michael Vavrus, 2002)*

Adapun tujuan utama dari pendidikan multikultural seperti dijelaskan Jacqueline Jordan Irvine adalah: *to improve race relations and to help all students acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to participate in cross-cultural interactions and in personal, social, and civic action that will help make our nation more democratic and just.* (Jacqueline Jordan Irvine, 2003) Disini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah untuk meningkatkan hubungan antar ras, serta membantu seluruh siswa dalam mendapatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam interaksi lintas budaya baik secara personal, social, dan tindakan kemasyarakatan yang akan membantu membuat negara kita lebih demokratis dan adil.

Sedangkan pendidikan multikultural sebagaimana dikembangkan oleh Prof. C.I Bennett dalam buku *Comprehensive Multicultural Education* yang dikutip H.A.R Tilaar, adalah suatu konsep dasar yang terintegrasi dan meliputi tujuan-tujuan yang sangat komprehensif. Konsep tersebut adalah sebagai berikut (Tilaar, 2009) Ada empat nilai inti atau *core value* dari pendidikan multikultural, yaitu :

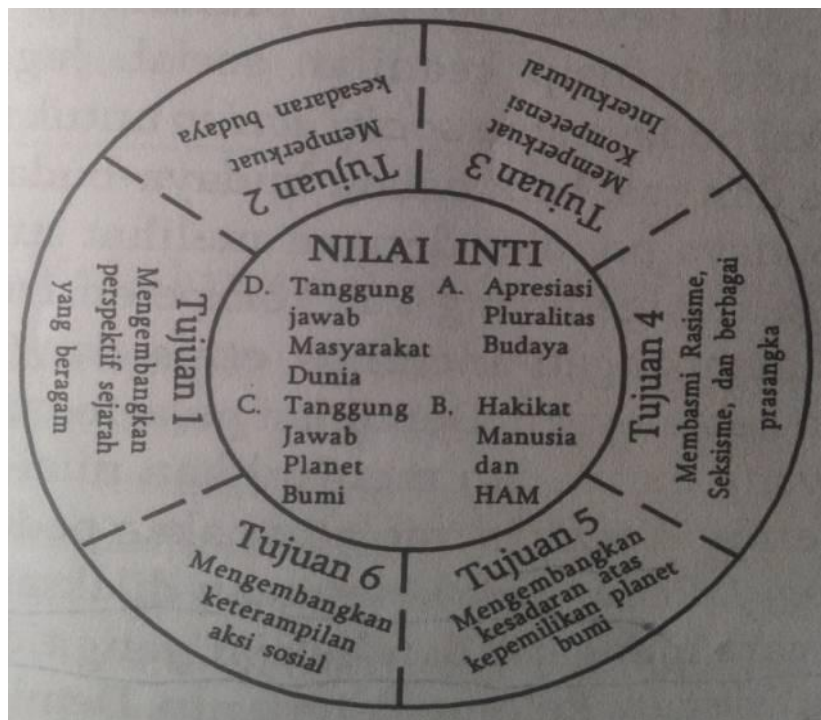
- a. Apresiasi terhadap adanya kenyataan budaya dalam masyarakat;
- b. Pengakuan terhadap harkat manusia dan HAM;
- c. Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia;
- d. Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Berdasarkan nilai-nilai inti tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dari pendidikan ini:

- a. Mengembangkan perspektif sejarah (*ethnohistorisitas*) yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat;
- c. Memperkuat kompetensi intercultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat;
- d. Membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka (*prejudice*);
- e. Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi ;
- f. Mengembangkan keterampilan aksi social (*social action*)



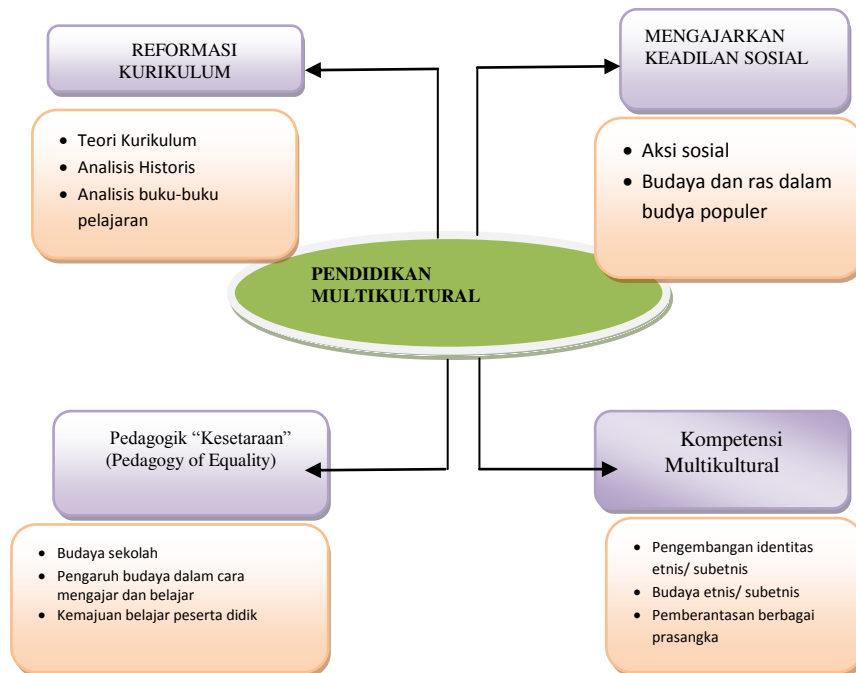
Konsep dasar ini bila digambar dalam bentuk diagram adalah(Tilaar, 2009)



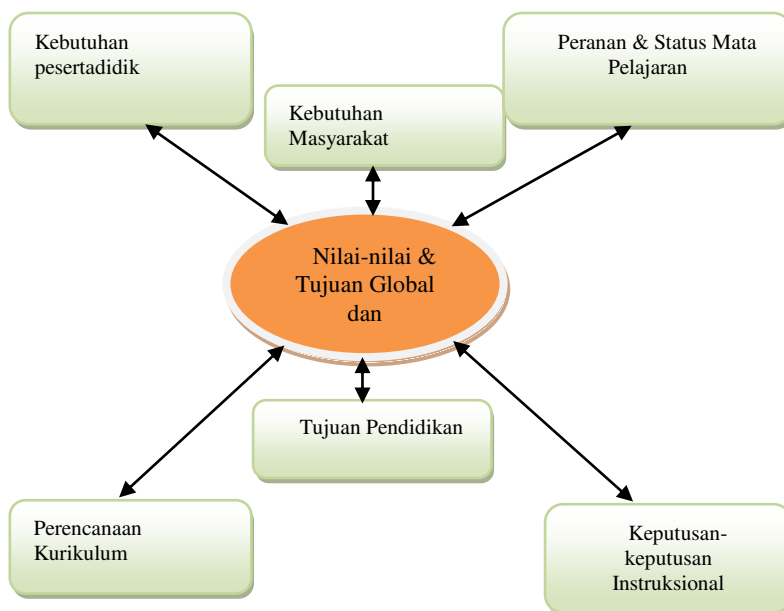
Selanjutnya, dari penjabaran konsep tersebut diperlukan penjabaran dalam berbagai jenis kegiatan, seperti:

1. Reformasi kurikulum yaitu dengan kegiatan analisis historis dengan cara menganalisis buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya ;
2. Mengajarkan prinsip-prinsip keadilan social. Dalam hal ini diperlukan aksi-aksi budaya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan ras, baik budaya tingkat tinggi maupun budaya populer dengan melihat struktur demokrasi masyarakat;
3. Mengembangkan kompetensi multikultural, meliputi pengembangan identitas etnis dan subetnis melalui kegiatan kebudayaan;
4. Melaksanakan pedagogik kesetaraan (*equality pedagogy*) di lembaga pendidikan seperti cara belajar dan mengajar yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi suatu kelompok tertentu.

Konsep dasar pengembangan pendidikan multikultural ini apabila digambar dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:



Selain itu, kerangka penyusunan dan petunjuk instruksional pendidikan multikultural sebagaimana yang dikembangkan oleh C.I Bennet, seperti dikutip oleh H.A.R. Tilaar, adalah sebagai berikut(Tilaar, 2009)



## 1. Mengembangkan Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural

Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural mengusung pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan. Pendidikan ini dibangun atas spirit relasi kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami,

dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan, dan interdependensi. Ini merupakan inovasi dan reformasi yang integral dan komprehensif dalam muatan pendidikan agama; memberi konstruk pengetahuan baru tentang agama-agama yang bebas prasangka, rasisme, bias, dan stereotip. Pendidikan Agama Islam multikultural memberi pengakuan akan pluralitas, sarana belajar untuk perjumpaan lintas batas, dan mentransformasi indoktrinasi menuju dialog. (Zakiyuddin Baidhaw, 2005)

Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural memiliki beberapa asumsi pokok yang menjadi karakteristiknya. Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural dialamatkan untuk memenuhi kebutuhan Nasional akan pendidikan yang secara berkesinambungan merepresentasikan keanekaragaman wajah agama (dan kultural) dan perjumpaannya dalam kesetaraan dan harmoni. (Zakiyuddin Baidhaw, 2005)

Wacana dan praktek pendidikan Agama Islam semacam ini menekankan multikulturalisme sebagai suatu kemungkinan dan kesempatan untuk saling belajar tentang, mempersiapkan untuk dan merayakan pluralitas agama dan etnik serta kultural melalui dunia pendidikan. Oleh sebab itu, ini menuntut suatu inovasi dan reformasi pendidikan agama sebagai upaya perubahan sosial, setidaknya pengarah atau pemandu proses perubahan sosial.

Oleh karena itu, menurut (Zakiyuddin Baidhaw, 2005) bahwa, pendidikan Agama (Islam) berwawasan multikultural perlu melakukan : *pertama*, inovasi dan reformasi dalam beberapa wilayah utama, seperti: (1)mengintegrasikan serta meng-komprehensifitas-kan muatan bahan ajar dalam pembelajaran. (2)Mengkonstruksi pengetahuan baru, maksudnya adalah semua pengetahuan apapun sebenarnya dibangun secara sosio-kultural, diciptakan oleh pikiran manusia untuk menjelaskan pengalaman dan karenanya dapat dikritik, menerima masukan untuk penyempurnaan dan senantiasa mengalami perubahan. (3) persamaan kesempatan dalam pendidikan. (4)mereduksi prasangka buruk dan rasisme melalui upaya memasukkannya ke dalam pengajaran tentang toleransi terhadap agama-agama lain. (5) penyadaran akan bias. (6) meluruskan bias gender. (7) mengeliminasi stereotip. (8) membenahi struktur pendidikan.

*Kedua*, Mengidentifikasi serta mengakui akan pluralitas. *Ketiga*, perjumpaan lintas batas. *Keempat*, interdependensi serta saling kerjasama. *Kelima*, melakukan pembelajaran efektif. *Keenam*, karena multikulturalisme menghendaki perjumpaan dalam keragaman, maka pendidikan agama berwawaskan multicultural mengkondisikan relasi antara guru dan siswa, antara guru dan guru, dan antara siswa dan siswa melalui proses interaksi yang produktif dan

efektif. Sedangkan salah satu tujuan pendidikan menurut Al-Jammali, dalam bukunya *Tarbiyah al-Issan al-Jadid* yaitu: Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW. (Imam Syafe'i, 2015)

## **2. Memotret Hakikat Pembelajaran PAI dan Ruang Lingkupnya**

Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan sebutan yang diberikan kepada subyek mata pelajaran (Mata pelajaran Akidah-Akhlak, Al-Qur'an dan Hadist, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fiqh) yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA).

Mengutip pendapat Azyumardi Azra, bahwa pembelajaran PAI adalah proses transformasi dan internalisasi pengetahuan nilai-nilai dan ketrampilan melaksanakan ajaran agama Islam yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, internalisasi PAI dalam diri manusia melalui proses pendidikan merupakan suatu proses persiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. (Azyumardi Azra, 1999)

Oleh karena itu, esensi pendidikan Islam pada hakekatnya terletak pada kriteria iman dan komitmennya terhadap ajaran agama Islam. Dari definisi ini, minimal ada tiga unsur yang mendukung pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu: (1) usaha berupa bimbingan bagi pengembangan potensi jasmaniah dan rohaniyah secara seimbang, (2) usaha tersebut didasarkan atas ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad, dan (3) usaha tersebut diarahkan pada upaya untuk membentuk dan mencapai kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang di dalamnya tertanam nilai-nilai Islam sehingga segala perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika nilai Islam ini telah tertanam dengan baik maka peserta didik akan mampu meraih derajat *insân kâmil*, yakni manusia paripurna-manusia ideal. (Moh. Roqib, 2011)

Seiring dengan sisi penting akhlak dan kepribadian mulia sebagai inti pendidikan maka pendidikan Islam dapat dipahami, sebagaimana dinyatakan oleh Syed Ali Ashraf dan Syed Sajjad Husein, seperti dikutip Moh. Roqib, yaitu:

*“Suatu pendidikan yang melatih jiwa murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis ilmu pengetahuan, mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Mereka dilatih, dan mentalnya menjadi begitu berdisiplin sehingga mereka ingin mendapatkan ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu*

*intelektual mereka atau hanya untuk memperoleh keuntungan materiil saja, melainkan untuk berkembang sebagai makhluk rasional yang berbudi luhur dan melahirkan kesejahteraan spiritual, moral, dan fisik bagi keluarga, bangsa, dan seluruh umat manusia”*(Moh. Roqib, 2011).

Dari apa yang dinyatakan di atas maka pendidikan Islam pada hakikatnya menekankan tiga hal, yaitu: (1) suatu upaya pendidikan dengan menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik, (2) bahan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berupa bahan materiil, yakni berbagai jenis ilmu pengetahuan dan spiritual, yakni sikap hidup dan pandangan hidup yang dilandasi nilai etis Islam, (3) tujuan yang ingin dicapai adalah mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur, serta mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dalam rengkuhan ridha Allah SWT. (Moh. Roqib, 2011)

Lalu, apa ruang lingkup pendidikan Islam sendiri? Pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperlihatkan dan mementingkan segi akidah (keyakinan), ibadah (ritual), dan akhlak (norma-etika) saja, tetapi jauh lebih luas dan dalam daripada semua itu. Para pendidik Islam pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa pendidikan Islam mencakup berbagai bidang: (1) keagamaan, (2) akidah dan amaliah, (3) akhlak dan budi pekerti, dan (4) fisik-biologis, eksak, mental-psikis, dan kesehatan. Dari sisi akhlak, pendidikan Islam harus dikembangkan dengan didukung oleh ilmu-ilmu lain yang terkait. (Moh. Roqib, 2011)

Dari penjelasan ini, dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam meliputi:

1. Setiap proses perubahan menuju kearah kemajuan dan perkembangan berdasarkan ruh ajaran Islam;
2. Perpaduan antara pendidikan jasmani, akal (intelektual), mental, perasaan (emosi), dan rohani (spiritual);
3. Keseimbangan antara jasmani - rohani, keimanan-ketakwaan, piker - dzikir, ilmiah-amaliah, materiil - spiritual, individual - sosial, dan dunia - akhirat;
4. Realisasi dwi fungsi manusia, yaitu fungsi peribadatan sebagai hamba Allah (*‘abdullah*) untuk menghambakan diri semata-mata kepada Allah dan fungsi kekhalifahan sebagai khalifah Allah (*khalifatullah*) yang diberi tugas untuk menguasai, memelihara, memanfaatkan, melestarikan dan memakmurkan alam semesta (*rahmatan lil ‘alamin*). (Moh. Roqib, 2011)

Maka, sistem pembelajaran pendidikan agama Islam hendaknya dirancang agar dapat merangkum tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang pada hakikatnya tunduk pada hakekat penciptaan-Nya. *Pertama*, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu bersifat fitrah, yaitu membimbing perkembangan manusia sejalan arah fitrah penciptaannya. *Kedua*, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam menentang dua dimensi yaitu tujuan akhir keselamatan dunia dan akhirat. *Ketiga*, tujuan pendidikan Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat universal yang tak terbatas oleh ruang lingkup geografis dan paham (*isme*) tertentu. (Jalaludin, 1994)

Oleh sebab itu, dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan murid dalam menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan antar umat Islam khususnya dan hubungan kerukunan antar-agama lain pada umumnya untuk mewujudkan persatuan nasional (Bhineka Tunggal Ika). (Muhaimin, 2004)

Sedangkan pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) secara formal adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya: al-Qur'an dan al-Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman, dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan dan persaudaraan bangsa. (Abdul Majid, 2004)

Pendidikan agama Islam berbasis multikultural merupakan proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan ideal ajaran Islam. Hal ini berusaha mengkaji tentang aspek-aspek perbedaan dan disparitas kemanusiaan dalam konteksnya yang luas sebagai suatu *sunnatullah* yang mesti diterima dengan penuh arif dan lapang dada. Terlebih, di tengah kenyataan kemanusiaan yang plural dalam segala dimensinya guna mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan.

Adapun karakteristik pendidikan agama Islam berwawasan multikultural yang dapat dikembangkan guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas yaitu:

1. Guru hendaknya dapat memberikan pemahaman kepada siswanya agar supaya dapat belajar dalam menghargai perbedaan;

2. Membangun saling percaya;
3. Memelihara saling pengertian (*mutual understanding*);
4. Menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*);
5. Terbuka dalam berfikir;
6. Apresiasi dan Interdependensi (saling menunjukkan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi, dan kesalingkaitan sosial yang rekat);
7. Guru dapat mengembangkan kegiatan resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. (Zakiyuddin Baidhawiy, 2005)

## **5. Penutup**

Pembelajaran PAI berbasis multikultural memang menuntut keahlian pendidik (guru/dosen) dalam implementasinya. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran PAI tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik (guru/dosen) dalam proses pembelajaran pendidikan multikultural dalam pendidikan agama Islam (PAI) ini adalah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan multikultural melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Sebab, dengan cara atau model ini peserta didik tidak merasa terbebani. Selain itu, tujuannya adalah, agar peserta didik dapat memahami konsep pendidikan multikultural tersebut sebagai bekal hidup ditengah-tengah realitas kebhinekaan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid dan Dian Andatani, (2004) *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Amin Abdullah, (2005) “Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan *Interest Minimalization* dalam Meredakan Konflik Sosial”, dalam M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Azyumardi Azra, (2005) “Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia”, dalam Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , (1999) *Pendidikan Islam dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, Jakarta, Logos Wacana.
- Cristina Allemann-Ghionda, (2001) Sociocultural and Linguistic Diversity, Educational Theory, and the Consequences for Teacher Education: A Comparative Perspective, dalam Carl A. Grant dan Joy L. Lei (editor), *Global Constructions Of Multicultural Education Theories and Realities*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.
- Driss Alaoui (editor), (2010) *Recherches en Education : Education et formation interculturelles regards critiques*, Université de Nantes - UFR Lettres et Langage, Perancis.
- H.A.R. Tilaar, (2009), *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , (2012), *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Henry Giroux, (2005), *Border Crossing: Cultural Workers and The Politics of Education*, Routledge, New York and London.
- Jacqueline Jordan Irvine, (2003), *Educating Teachers for Diversity, Seeing With a Cultural Eye* Teachers College Press, Columbia University New York and London.
- Jalaluddin, (1994) *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (eds), (2010) *Multicultural Education Issues and Perspectives*, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc, Washington.
- Michael Vavrus, (2002), *Transforming the Multicultural Education of Teachers Theory, Research, and Practice*, Teachers College Press, Columbia University New York and London.
- Moh. Roqib, (2011), *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, LKiS, Yogyakarta.
- Muhaimin, (2004), *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Organisation des Nations Unies pour L’Éducation La Science et La Culture, (2006) *Principes directeurs de l’UNESCO pour l’éducation interculturelle*, a été Publié par UNESCO, Paris, France.
- Toto Suharto, (2012) *Pendidikan Berbasis Masyarakat Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*, LKiS, Yogyakarta.



Zakiyuddin Baidhaw, (2005) *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

**Web**

<http://rinesosiolog.blogspot.com/2015/01/materi-sosiologi-kelas-xi-ips-semester-1.html> dan <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11357/undp-luncurkandatabase-konflik-sosial-di-indonesia>, di akses tanggal 16 April 2015.

**Jurnal**

Syafe'I, Imam, (2015) *Tujuan Pendidikan Islam*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, November . Hlm.6